

Irdani Hermawan_192020100039

by Turnitin Indonesia

Submission date: 05-Oct-2023 06:43AM (UTC-0700)

Submission ID: 2186433032

File name: Irdani_Hermawan_192020100039.docx (239.96K)

Word count: 4398

Character count: 28838

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo

Irdani Hermawan¹⁾, Lailul Mursyidah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: irdanihermawan96@gmail.com

Abstract. The purpose of this research is to examine how well the Smart Indonesia Program Policy (PIP) has been implemented at Krian 3 Public Middle School in Sidoarjo City. A qualitative descriptive research method was used for this investigation. A qualitative approach was used. Reviewing laws, conducting interviews, and keeping careful notes are all examples of data collecting methods. Data analysis techniques that include simplification, visualization, and inference. One of the government's measures meant to level the playing field in terms of education is the Smart Indonesia Program (PIP). In accordance with the Indonesian Minister of Education and Culture Regulation No. 9 of 2018, the government has made significant efforts to promote the Smart Indonesia Program (PIP) in order to ensure that all citizens are able to access the educational services to which they are entitled. This PIP was created to assist low-income children with their elementary school (SD) through high school (SMA) tuition costs. Based on the findings of this research, it is clear that Krian 3 Public Middle School in Sidoarjo City is not fully implementing the Smart Indonesia Program Policy (PIP). Where there are still a number of issues, such as insufficient PIP-related dissemination, improper use of PIP money, and a lack of readily available proof of such usage.

Keywords - Policy Implementation; Smart Indonesian Program; Krian 3 Public Middle School

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penyelidikan ini. Pendekatan kualitatif digunakan. Meninjau undang-undang, melakukan wawancara, dan membuat catatan yang cermat adalah contoh metode pengumpulan data. Teknik analisis data yang meliputi penyederhanaan, visualisasi, dan inferensi. Salah satu upaya pemerintah untuk menyamakan kedudukan dalam bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018, pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan untuk menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) guna memastikan seluruh warga negara dapat mengakses layanan pendidikan yang menjadi haknya. PIP ini diciptakan untuk membantu anak-anak berpenghasilan rendah dalam biaya pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Berdasarkan temuan penelitian, terlihat jelas bahwa SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo belum sepenuhnya melaksanakan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Dimana masih terdapat beberapa permasalahan, seperti sosialisasi terkait PIP yang belum memadai, penggunaan uang PIP yang tidak tepat, dan kurangnya bukti penggunaan yang tersedia.

Kata Kunci - Implementasi Kebijakan; Program Indonesia Pintar (PIP); SMP Negeri 3 Krian

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses mempelajari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku sekelompok orang yang diajarkan, dilatih, dan diteliti sehingga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berinvestasi dalam sistem pendidikan di negara ini sangat penting bagi kemajuannya secara keseluruhan. Pendidikan adalah langkah pertama dalam membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pendidikan memang penting, namun tidak semua orang bisa mengaksesnya. Mahalnya biaya pendidikan tinggi memperparah masalah ini. Oleh karena itu, individu memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya daripada melanjutkan studi. Angka putus sekolah sebagian besar disebabkan oleh kesulitan keuangan. Diperkirakan 4,7 juta siswa di bawah usia 18 tahun putus sekolah pada tahun 2015, menurut data yang dikumpulkan oleh UNICEF Indonesia. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat ke-57 dalam Indeks Pembangunan Pendidikan dari 115 negara pada tahun 2014, seperti yang dilaporkan oleh Laporan Pemantauan Pendidikan untuk Semua Global UNESCO. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah yaitu dengan

memberikan bantuan untuk menunjang pendidikannya. Beasiswa merupakan salah satu alternatif untuk siswa yang mempunyai keinginan untuk sekolah dan dapat memenuhi kebutuhan sekolah.

Karena pendidikan sangat penting untuk menyukkseskan semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya, pertumbuhannya sangat penting bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menjamin hak setiap orang atas pendidikan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan minat dan kemampuannya, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, budaya, atau gender. Mencerdaskan kehidupan bangsa ditetapkan sebagai tujuan nomor empat sistem pendidikan nasional Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh penduduk, yang dikoordinasikan oleh pemerintah, sekolah nasional. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, yang disahkan sebagai tanggapan terhadap undang-undang ini, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga tentang Pendidikan Nasional, dan kini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai masa depan kebijakan pendidikan Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Ayat 4, Undang-Undang No. 20 tentang Pendidikan di Indonesia tahun 2003. Kemiskinan merupakan hambatan utama terhadap pendidikan karena hal ini menghalangi individu yang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. mampu membelinya.

Jika dibandingkan dengan negara lain, termasuk sesama negara ASEAN, tingkat pendidikan Indonesia yang rendah merupakan hal yang menonjol. Kualitas sumber daya manusia Indonesia juga buruk. Dampak kemiskinan terhadap peluang seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Peningkatan pemerataan, peningkatan pembiayaan pendidikan, penurunan angka putus sekolah, dan penurunan kemiskinan merupakan bagian dari jawaban terhadap tantangan pendidikan di Indonesia. Inisiatif Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah berharap dengan menerapkan strategi tersebut dapat melahirkan generasi yang lebih bermoral dan terpelajar. Semua anak di Indonesia yang berusia antara 6 dan 21 tahun yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah diwajibkan oleh hukum untuk berpartisipasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Agama bertanggung jawab melaksanakan PIP. Sejak semester akhir tahun 2014, PIP telah diikutsertakan dalam program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP ini mencakup seluruh Indonesia dan penuh dengan kesulitan. Banyak permasalahannya, seperti anak-anak yang bukan berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Salah satu upaya pemerintah untuk menyamakan kedudukan dalam bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ed. dan Kultus. Republik Indonesia, pemerintah telah berupaya keras untuk mensosialisasikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, khususnya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Populasi sasaran PIP ini adalah anak-anak berpenghasilan rendah di kelas pra-K hingga 12 (Septiandika, 2017). Menurut (Rohaeni & Saryono, 2018), kebijakan PIP melalui KIP yang dikeluarkan pemerintah di bawah kewenangan Kementerian dan Kebudayaan berupaya untuk mencegah anak-anak putus sekolah dengan memberikan bantuan tambahan kepada siswa berpenghasilan rendah agar mereka dapat tetap bersekolah. Setiap sekolah harus melakukan perannya untuk memastikan bahwa kebijakan PIP dilaksanakan secara efektif melalui KIP untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa PIP tersebut akurat dan sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, banyak siswa dalam situasi ini masih gagal untuk lulus SMA karena mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya.

Menurut aturan dan undang-undang tersebut, setiap orang yang tinggal di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang di Indonesia mempunyai hak hukum atas pendidikan. Namun niat pemerintah untuk menetapkan wajib belajar belum sepenuhnya terwujud karena tidak semua penduduk Indonesia mempunyai akses terhadap pendidikan. Persoalan kemiskinan yang menghalangi individu untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu persoalan yang tidak memajukan pendidikan. Keluarga berpendapatan rendah dan menengah secara historis merupakan kelompok yang paling sulit mendapatkan uang untuk pendidikan tinggi. Mereka adalah kelompok umum yang terkena dampak kenaikan biaya sekolah. Preferensi individu dalam belajar dan mengajar dapat diakomodasi. Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar merupakan dua contoh dedikasi pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat

membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak.

Masih banyak generasi muda usia sekolah yang putus sekolah karena permasalahan keuangan, dan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diciptakan sebagai inisiatif pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Siswa dari kalangan berpendapatan rendah mendapatkan manfaat besar dari akses terhadap Kartu Indonesia Pintar karena mereka lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah dibandingkan siswa dari kelompok kaya. Program Indonesia Pintar diciptakan untuk memastikan bahwa anak-anak berpenghasilan rendah di Indonesia memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk tetap bersekolah dan sukses secara akademis. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menggunakan dana tersebut untuk menutupi biaya pendidikan termasuk uang sekolah, buku, dan perlengkapan, serta untuk membelanjakan uang. Dengan adanya Program Indonesia Pintar, kesulitan keuangan diyakini tidak lagi menjadi alasan siswa berhenti sekolah. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Agama, dana ini memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang berada pada usia sekolah.

Di lapangan, di SMP Negeri 3 Krian, berbagai kendala dinilai menghambat keberhasilan Program Indonesia Pintar. Permasalahan mengenai keakuratan PIP, penggunaan dana PIP yang tidak tepat, dan pembuktian pengeluaran PIP, semuanya saling berhubungan. Gagasan program KIP Cerdas di Indonesia sudah jelas dan penerima manfaatnya konsisten dengan penerima PIP. Tabel ini membandingkan jumlah penerima PIP dan total anggaran PIP tahun 2020-2022 di SMP Negeri 3 Krian.

**Tabel 1. Rekapitulasi Penerima PIP di SMP Negeri 3 Krian
Pada tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
1	2020	127	190.500.000
2	2021	60	90.000.000
3	2022	8	12.000.000

Sumber : Diolah dari SMP Negeri 3 Krian (2023)

Jumlah siswa penerima dana PIP tahap 1 dan 2 di SMP Negeri 3 Krian mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022, seperti terlihat pada tabel di atas, dengan rincian 127 siswa menerima dana PIP pada tahun 2020, 60 siswa menerima dana PIP pada tahun 2021, dan 8 siswa menerima dana PIP pada tahun 2022. Ada beberapa permasalahan yang berkontribusi terhadap hal ini. Kesalahpahaman antar orang tua sering terjadi pada rumah tangga penerima PIP. Penyediaan uang PIP dievaluasi kembali dengan memberikan sesuai kriteria PIP mengingat penilaian mahasiswa yang memburuk, kurangnya bukti penggunaan dana PIP, dan kurangnya sosialisasi yang jelas tentang uang PIP kepada mahasiswa.

Beberapa studi preseden dapat menjadi masukan untuk mengkaji bagaimana program beasiswa PIP dilaksanakan di SMP Negeri 3 Krian. Yang pertama "Implementasi Kebijakan PIP di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)" oleh Rizky Adyatma. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Implementasi Program Beasiswa PIP menjadi subjek penelitian ini. Temuan penelitian ini merinci bagaimana kebijakan PIP di SDN Gogik 1 dievaluasi berdasarkan lima kriteria: jenis manfaat, besaran perubahan yang diharapkan, lokasi geografis, kewenangan pengambilan keputusan, dan kepatuhan pelaksana. Penggunaan penelitian kualitatif dan fokus pada Implementasi Kebijakan PIP adalah dua hal yang menjadikan penelitian ini serupa dengan penelitian lain di lapangan. Sementara itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian serupa lainnya karena penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di SDN Grog 1 Semarang, sedangkan penelitian kali ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Berikut penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan PIP di Tingkat Sekolah Dasar" oleh Muhamad Fiqih dkk. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi kebijakan PIP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal ini sekolah

mengikuti prosedur yang dirancang untuk siswa sudah dapat, tetapi masih belum berjalan dengan lancar, karena yang mendapatkan program Indonesia Pintar masih belum sesuai dengan target penerima bantuan. Mirip dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam pengumpulan dan analisis datanya. Implementasi Kebijakan PIP masih menjadi bidang kajian utama. Penelitian ini unik dibandingkan dengan penelitian lain karena merupakan studi kasus. Penelitian ini fokus pada sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan penelitian sebelumnya merupakan studi kasus pada tingkat sekolah dasar. Hartini Retnaningsih juga melakukan penelitian yang diberi nama "Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan)". Alat pengumpul data untuk penelitian semacam ini sering dilakukan termasuk wawancara langsung dan observasi biasa. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kelompok elit di Kupang dan Palembang tidak memasukkan anak-anak yang layak menerima bantuan PIP, sehingga menyebabkan implementasi program menjadi tidak efektif.

Pertama, diusulkan agar dilakukan analisis menyeluruh terhadap PIP di Kupang dan Palembang; kedua, direkomendasikan agar dilakukan persiapan yang jelas untuk memastikan bahwa politisi tidak lagi mempunyai suara dalam penyaluran dana PIP di Kupang dan Palembang; dan keempat, direkomendasikan agar dikembangkan kerangka kerja yang mengatur penyaluran dana PIP. Penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian lain karena menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan strategi pengumpulan data yang sama. Paralel lainnya adalah penerapan kebijakan PIP menjadi topik kajian utama dalam kedua kasus tersebut. Sementara itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian serupa lainnya karena penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda. Penelitian ini mengenai penerapan kebijakan PIP dan jaminan sosial di bidang pendidikan, dilakukan di SMP 3 Negeri Krian Kabupaten Sidoarjo Kota Kupang.

Pertama, pencairan dana yang tidak tepat waktu merupakan salah satu prosedur pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang bersumber dari data yang dikumpulkan di lapangan. Kedua, banyak orang tua di lapangan melaporkan bahwa anaknya telah menghabiskan uang beasiswa PIP untuk tujuan non-akademik. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk mengetahui kondisi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, mengingat masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan Teori Edward III (Edward, 1980) yang terdiri dari empat indikator: Komunikasi, Layanan, Kebijakan Privasi, dan Kelembagaan.

Menurut analisis etimologis Webster's Dictionary karya Sorichin Abdul Wahab (2004), kata "use" berasal dari frasa bahasa Inggris "to put to use good." Menurut Merriam-Webster, "penggunaan" berarti "memberikan arti penting" dan "menghasilkan hasil yang diinginkan". Memanfaatkan, yang merupakan akar kata tindakan dalam bahasa Inggris, berarti memanfaatkan apa pun. Memberikan pengaruh pada apa pun adalah apa yang kita maksud ketika kita mengatakan "menggunakan". Tindakan yang diambil dalam suatu negara yang berdampak pada hukum, peraturan, keputusan pengadilan, dan kebijakan resmi pemerintah negara tersebut. Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, adalah "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan", yang melampaui makna tradisional yaitu "praktik". Dengan kata lain, tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatasi dan pada akhirnya menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan.

II. METODE

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2007: 27) bersifat “deskriptif”, “mengutamakan proses dibandingkan hasil”, “membatasi ruang lingkup penelitian”, “memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data”, “menggunakan desain sementara,” dan “hasilnya disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.” Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar menjadi subjek penelitian ini. SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan analisis lapangan mengenai implementasi aktual Kebijakan PIP di SMP Negeri 3 Krian sebagai sumber data utama. Studi ini mengacu pada data sekunder dari sejumlah proyek dan undangan penelitian lainnya. dengan melakukan wawancara, membuat catatan rinci, dan mencatat observasi. Mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan merupakan cara analisis data yang digunakan. Menurut (Sugiono, 2015), strategi purposive sampling adalah suatu metode pemilihan sampel informan untuk dijadikan sebagai sumber data setelah mempertimbangkan secara matang sejumlah faktor. Kepala Sekolah, Bendahara PIP, dan Siswa Penerima PIP dari SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo diwawancarai untuk penelitian ini karena dianggap familiar dengan Program Indonesia Pintar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siswa SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti Program Indonesia Pintar berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk membantu siswa sukses secara ekonomi sehingga dapat tumbuh secara profesional dengan mengatasi permasalahan seperti kekurangan uang saku dan kekurangan perbekalan. Anak-anak miskin, baik yang bersekolah maupun tidak, mendapat prioritas dalam penjabatan dana dukungan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa akan menerima tunjangan tahunan sebesar Rp 750.000,00 yang digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan transportasi ke dan dari sekolah. Untuk memastikan semua anak mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas, bebas hambatan finansial, dan tidak ada anak yang tertinggal (Saryono, 2018).

Berdasarkan teori Edward III, berikut ini dapat kami uraikan sehubungan dengan implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo: Komunikasi; Sumber daya; Sikap; dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Edward III mengidentifikasi tiga aspek kunci komunikasi yang efektif: (1) transmisi, atau metode penyebaran informasi; (2) kejelasan informasi yang disebarluaskan; dan (3) konsistensi dalam menyebarkan informasi. Terjadi transmisi, dengan sosialisasi kebijakan Program Indonesia Pintar yang diumumkan pada akhir tahun 2014; kedua, kejelasan informasi yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di berbagai sekolah, salah satunya sosialisasi di SMP Negeri 3 Krian; dan ketiga, konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Sedangkan definisi lain dari komunikasi adalah “proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan” (Edward III, Widodo, 2010, p. 97), namun kedua definisi tersebut saling melengkapi. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), aktor kebijakan memerlukan informasi tentang kebijakan publik agar dapat mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan dan mencapai maksud dan tujuannya.

Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat telah berhasil dilaksanakan di banyak sekolah, termasuk SMP Negeri 3 Krian di Kabupaten Sidoarjo. Namun sosialisasi di SMP Negeri 3 Krian Kota Sidoarjo masih belum begitu kentara atau mudah dipahami mengingat pemahaman PIP yang menyeluruh dan jelas bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, sering terjadi kesenjangan dalam kriteria yang diperlukan untuk menerima data. Masih ada ruang untuk perbaikan dalam cara SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo berkomunikasi dengan siswa dan orang tuanya. Berikut adalah sosialisasi pada saat Kebijakan

Program Indonesia Pintar (PIP) disampaikan kepada wali murid dan murid yang menerima dana PIP dan dihadiri para Guru yang terkait dan juga Kepala Sekolah serta Kepala PIP, antara lain :

Gambar 1



Sosialisasi Kebijakan Program PIP

Seperti terlihat pada Gambar 1, Bapak dan Ibu Orang Tua Siswa SMP Negeri 3 Krian menghadiri undangan sosialisasi Program Indonesia Pintar, dimana penerima bantuan diumumkan dan siswa serta orang tua diberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang Program Indonesia Pintar. Kebijakan Program Indonesia (PIP). Untuk menghindari kemacetan dan pembatasan, sosialisasi PIP dibagi menjadi dua sesi yang dilaksanakan selama sebulan.

Gambar 2



Sosialisasi Kebijakan Program PIP

Siswa dan orang tua penerima uang PIP menghadiri sesi kedua sosialisasi Kebijakan Program PIP seperti terlihat pada Gambar 2. Acara silaturahmi pihak PIP ini dihadiri oleh pimpinan sekolah, ketua PIP, dan para petinggi lainnya. Sosialisasi putaran kedua berjalan baik dalam hal pemaparan isu-isu yang harus diatasi dalam Program Indonesia Pintar. Dengan harapan agar orang tua dan anak mendapat informasi dan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik. Hal-hal seperti membeli buku pelajaran dan membayar seragam sekolah adalah contohnya.

Sumber Daya

Setiap strategi, sebagaimana dikemukakan Edward III dalam Indiahono (2009:31-32), memerlukan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun finansial. Dalam skenario ini, kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. sumber daya yang tersedia yaitu (1) manusia dan (2) uang.

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan lebih bergantung pada manusia dibandingkan faktor lainnya. Sumber daya yang berkualitas diperlukan pada setiap langkah implementasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara objektif. Selain tenaga kerja, faktor penting lainnya dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah uang dan waktu. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP 3 Negeri Krian Kota Sidoarjo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2022 dinilai telah memenuhi kriteria kualitas sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo, karena sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, Dinas Pendidikan bertanggung jawab penuh dalam pencairan dana dan konfirmasi informasi siswa yang berhak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara itu, kepala sekolah dan administrator sekolah akan terlibat secara aktif dengan informasi tentang calon siswa sebagai bagian dari pihak pelaksanaan sekolah.

Kabupaten Sidoarjo sendiri setiap tahunnya mendapat pendanaan dari pemerintah pusat, dengan pencairan yang berbeda-beda dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada website Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat sejumlah artikel mengenai pendanaan Program Indonesia Pintar, antara lain rincian pelaksanaannya di SMP Negeri yang terletak di Krian No. 3 Kecamatan Wonoayu. Dimana pelaksanaan penyalurannya masih belum 100% karena beberapa kendala antara lain buruknya kinerja program di masa wabah Covid 19 dan berkurangnya pembiayaan. Akibatnya, masih banyak siswa di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar. Berikut rincian jumlah uang yang masuk dan keluar setiap SMP di Kabupaten Wonoayu antara tahun 2020 dan 2022.

Tabel 2. Perbandingan jumlah dana diterima dan disalurkan pada tingkat SMP di Kecamatan Wonoayu Tahun 2020-2022

TAHUN	DANA DITERIMA	DANA DISALURKAN/DICAIKIRKAN
2020	341.625.000	242.625.000
2021	496.500.000	248.625.000
2022	370.875.000	298.125.000

Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/>

Seperti terlihat pada tabel 2, terdapat variasi yang cukup besar setiap tahunnya terhadap uang PIP yang diterima dan disalurkan ke seluruh Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kabupaten Wonoayu. Total penerimaan tahun 2020 adalah \$341.625.000, sedangkan pembayarannya adalah \$242.625.000. Padahal pada tahun 2021 terkumpul 496.500.000, namun yang benar-benar disalurkan hanya 248.625.000. Terakhir, pada tahun 2022, total \$370.875.000 telah diterima dan \$298.125.000 telah didistribusikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah uang yang dikumpulkan dan jumlah yang diberikan kepada siswa. Salah satu penyebab banyak siswa yang belum mendapatkannya adalah karena mereka tidak diterima di program PIP karena tidak memenuhi standar. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang dilaporkan dan jumlah sebenarnya yang diberikan. Hal ini karena administrator PIP memperhitungkan sejumlah faktor.

Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Di sini disposisi pelaksana merupakan segi tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh agen yang melakukan penerapan. Pelaksana kebijakan mungkin gagal memenuhi standar dan mencapai tujuan jika mereka kurang memahami tujuan dan maksud kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga

merupakan hal yang krusial. Edward III dalam Widodo (2010: 104) mengartikan disposisi sebagai “kehendak, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan tujuan kebijakan”.

Dalam hal ini, disposisi pelaksana (Disposition) berkaitan dengan tindakan atau reaksi yang dilakukan para pelaksana selama pelaksanaan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut melalui Program PIP. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pelaksana untuk memastikan semua siswa di Indonesia memiliki akses terhadap program ini, meskipun mereka mungkin tidak mampu membiayainya sendiri. Pasal 10 dan 11 lebih merinci Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Baik sikap orang yang melaksanakan kebijakan maupun orang yang melaksanakan kebijakan. Di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo misalnya, yang menerapkan kebijakan PIP, mentalitasnya positif. Dimana respon positif dari pengelola program memberikan dorongan pada inisiatif Indonesia Pintar yang mungkin dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Pihak administrasi dan guru di SMP Negeri 3 Krian, tempat Program Indonesia Pintar dikembangkan dan dilaksanakan, memiliki antusiasme yang tinggi terhadap inisiatif ini.

Struktur Birokrasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur birokrasi mengacu pada sifat, kebiasaan, dan jaringan yang berulang antara otoritas eksekutif dan sumber daya yang mereka miliki. Efisiensi penerapan kebijakan pemerintah merupakan ukuran efektivitas birokrasi. Birokrasi yang baik sangat penting untuk kelancaran operasional dan keberhasilan implementasi kebijakan; tanpanya, implementasi kebijakan akan gagal. Birokrasi yang berfungsi dengan baik memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan selalu berkomunikasi satu sama lain. Di SMP Negeri 3 Kabupaten Krian Sidoarjo, terdapat beberapa perubahan struktur administrasi yang dilakukan sebagai bagian dari Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).

Gambar 1. Struktur Birokrasi SMP 3 Krian Kota Sidoarjo



Gambar berikut menggambarkan bahwa SMP Negeri 3 Krian mempunyai pelaksana khusus kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Yang pertama adalah masalah pembiayaan seluruh siswa di SMP Negeri 3 Krian; permasalahan ini merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah Bapak Sueb Rizal, S.Pd., M.Pd., yang melapor kepada Bapak Ir. H. Suryono dari Komite Sekolah. Kepala Sekolah kemudian mengangkat Ibu Dian Paramita., S.Pd. sebagai Bendahara, posisi yang secara unik cocok untuk pencairan dana PIP. Informasi kelas juga dicatat dengan bantuan anggota staf lainnya, khususnya instruktur wali kelas siswa.

IV Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan serta penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh. Oleh karena itu, ditemukan bahwa implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP 3 Negeri Krian banyak menemui kendala, seperti misalnya penyaluran PIP yang menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua siswa. Terkadang terdapat kekurangan dalam aturan atau kriteria penerimaan uang PIP karena tidak adanya bukti penggunaan dana PIP dan sosialisasi mengenai uang PIP tidak jelas kepada siswa.

Edward III pada prinsipnya dapat menguraikan empat indikator yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo, yang pertama adalah Komunikasi. Kajian ini menemukan keterkaitan antara komunikasi dan sosialisasi dalam kaitannya dengan kebijakan Program Indonesia Pintar yang baru saja diberlakukan. dipublikasikan pada akhir tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sumber daya moneter dan temporal juga sangat penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi adalah faktor ketiga. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa sikap (disposisi) para pelaksana merupakan sisi positif dari perilaku atau reaksi mereka terhadap Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Dimana reaksi pelaksanaannya positif dan menggembirakan terhadap program Indonesia. Terakhir, kita mempunyai struktur administrasi yang sepadan dengan berbagai tugas di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana PIP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin memberikan dukungan kepada orang-orang yang telah membantu membentuk saya menjadi seperti sekarang ini: orang tua saya, sahabat saya, dan atasan saya. Selain itu, Kepala Sekolah dan personel terkait lainnya di SMP Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo patut diingat sebagai tempat penelitian saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa penerima PIP dan mengikuti penelitian. Tanpa mereka, saya tidak akan dapat melakukan penelitian ini secara maksimal.

REFERENSI

- [1] Edward, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- [2] J, M. d. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Jones, C. O. (1991). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: CV Rajawali.
- [4] Kebudayaan, K. P. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta Pusat: BN.2020/No.158, jdih.kemdikbud.go.id : 11 hlm.
- [5] KEMDIKBUD. (n.d.). Program Indonesia Pintar. PUSLAPDIK.
- [6] Kusnaeni, R. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI KABUPATEN SEMARANG. ejournal3.
- [7] Muhamad Fiqih, U. D. (2022). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar. FEB UNMUL.
- [8] Pusat, P. (2003). Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Undang-Undang.
- [9] Pusat, P. (2014). Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Undang-Undang.
- [10] Pusat, P. (2015). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta Pusat: Perpres.
- [11] Retnaningsih, H. (2017). PROGRAM INDONESIA PINTAR:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN(STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN). Jurnal Masalah Sosial.
- [12] Saryono, N. E. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. IJEMAR
- [13] Solichin, A. W. (2004). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- [15] Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.feb.unmul.ac.id

Internet Source

2%

2

journal.uta45jakarta.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

4

jurnal.unigal.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

1%

7

123dok.com

Internet Source

1%

8

ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

1%

9

archive.umsida.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On